



bpsdm
PROVINSI
Kalbar

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE TRIWULAN III



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JALAN GUSTI JOHAN IDRUS NO. 12, PONTIANAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuas masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayan publik. Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sembilan unsur tersebut adalah persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tariff, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Survei Kepuasan Masyarakat Periode II pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat mengambil sampel peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahap II Angkatan 155 dan 156 Tahun 2022 dengan jumlah responden 80 orang dari 80 peserta. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh adalah 88,59 dengan predikat Sangat Baik.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur. Atas dasar meningkatkan kualitas pelayanan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Proses Survei Kepuasan Masyarakat dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2022 dan akan dibagi menjadi 4 (empat) laporan per triwulan. Hasil dari survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Pontianak, Oktober 2022

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat



MARJANI, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 198703 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud Tujuan	1
D. Profil Organisasi dan Sumber Daya Aparatur	2
E. Metode	3
F. Tim Survei Kepuasan Masyarakat.....	3
G. Jadwal Pelaksanaan	4

BAB II ANALISIS DAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil/Data Responden.....	5
B. Data Kuesioner	5
C. Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat	5
D. Saran Perbaikan dari Responden	6
E. Hasil Analisis	6
F. Tindak Lanjut	7
G. Perbandingan Hasil Survei	7

BAB III PENUTUP

G. Kesimpulan.....	9
H. Saran/Rekomendasi.....	9

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	2
Tabel 1.2	Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat	3
Tabel 1.3	Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Triwulan II	4
Tabel 2.1	Hasil Rekapitulasi Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Triwulan II	5
Tabel 2.2	Urutan Nilai Per Unsur Pelayanan dari Tertinggi hingga Terendah pada Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Triwulan II	7
Tabel 2.3	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Triwulan I dan Periode Triwulan II	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

D. Profil Organisasi & Sumber Daya Aparatur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan melaksanakan fungsi penunjangurusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan. Tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat kemudian dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalbar memiliki 104 orang pegawai yang terdiri dari 85 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat Bulan Maret 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>				
1	Doktor (S3)	1	2	3
2	Magister (S2)	17	9	26
3	Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV)	11	18	29
4	Diploma III (DIII)	3	2	5
5	SLTA/SMA	18	4	22
<i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>				
1	Magister (S2)	-	1	1
2	Sarjana (S1) / Diploma IV (DIV)	2	4	6
3	Diploma III (DIII)	-	1	1
4	SLTA/SMA	10	-	10
5	SD	-	1	1
Jumlah Keseluruhan		62	42	104

E. Metode

Saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat merupakan perangkat daerah penyelenggara pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dengan metode *blended learning* yaitu belajar secara klasikal (tatap muka) dan non klasikal. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain adalah Pelatihan Kepimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Teknis.

Kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sudah menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat memanfaatkan instrumen evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022.

Pada Triwulan ke III di tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan berbagai pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan *blended learning*. Salah satu pelatihannya adalah Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahap II Angkatan 155 dan 156 Tahun 2022 yang mana akan dijadikan sampel untuk Survei Kepuasan Masyarakat Periode Triwulan III. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni – 01 Oktober 2022 dengan jumlah peserta 80 orang yang berasal dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang.

F. Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Tim Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 terdiri dari Pejabat Struktural yang tergambar seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022

No	Nama	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Instansi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Marjani, S.E., M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2	Juliansyah, S.IP., M.Si	Ketua	Sekretaris Badan
3	Socha Summarjaya, S.IP	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Ita Asih Indrawati, S.Sos., M.Si	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
5	Risfatriati, S.Sos	Anggota	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
6	Fatmawati, S.Pd., M.Pd	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat untuk Periode Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Periode Triwulan III Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	26 s.d 27 September 2022
2	Pengumpulan Data/ Survey IKM	29 s.d 30 September 2022
3	Pengolahan Data Indeks	03 s.d 04 Oktober 2022
4	Penyusunan dan Pelaporan	05 s.d 06 Oktober 2022

BAB II ANALISIS & HASIL SKM

A. Profil / Data Responden

Responden yang menjadi sampel pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Periode Triwulan III merupakan Pegawai Negeri Sipil peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahap II Angkatan 155 dan 156 Tahun 2022 yang berjumlah 80 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata 1.

B. Data Kuesioner

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner disusun berdasarkan unsur pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017. Unsur-unsur pelayanan tersebut antara lain persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tariff, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil pengolahan data kuesioner tersebut terlampir. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat menyediakan kuesioner secara daring pada website serta menyebarkan tautan *google form* kepada peserta pada setiap akhir kegiatan.

C. Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan pengolahan data kuesioner, dapat diketahui hasil Indeks Kepuasan Masyarakat adalah **88,59**, maka kinerja unit pelayanan berada dalam mutu pelayanan A dengan predikat SANGAT BAIK. Berikut rekapitulasi data kuesionernya:

Tabel 2.1
Hasil Rekapitulasi Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Periode Triwulan III Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3,325	83,125	B	Baik
2	Prosedur	3,400	85,000	B	Baik
3	Waktu pelayanan	3,450	86,250	B	Baik
4	Biaya/tarif	3,513	87,825	B	Baik
5	Produk layanan	3,475	86,875	B	Baik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kompetensi pelaksana	3,663	91,575	A	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,550	88,750	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,588	89,700	A	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan	3,963	99,075	A	Sangat Baik
Hasil SKM/Nilai IKM		3,544	88,592	A	Sangat Baik

D. Saran Perbaikan dari Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, maka dapat diperoleh pula saran perbaikan yang telah diberikan oleh responden. Saran perbaikan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di asrama seperti lemari dan lampu yang sering terputus, ruang tunggu untuk mentor saat pelaksanaan seminar, serta jaringan internet untuk di asrama.
2. Meningkatkan frekuensi pemeliharaan asrama terutama di bagian bak air di kamar mandi.
3. Meningkatkan penyebaran informasi pelayanan pelatihan di seluruh media informasi yang dimiliki.
4. Perlu adanya *ice breaking* selama penyampaian materi berlangsung panjang agar meningkatkan semangat peserta kembali.

E. Hasil Analisis

Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sudah menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara sepenuhnya. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada Periode Triwulan III dengan sampel data Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahap II Angkatan 155 dan 156 Tahun 2022 menghasilkan jumlah responden sebanyak 80 orang dari 80 orang peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah penanganan pengaduan. Sedangkan unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan. Adapun urutan nilai per unsur pelayanan dari tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kompetensi pelaksana	3,663	91,575	A	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,550	88,750	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,588	89,700	A	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan	3,963	99,075	A	Sangat Baik
Hasil SKM/Nilai IKM		3,544	88,592	A	Sangat Baik

D. Saran Perbaikan dari Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar, maka dapat diperoleh pula saran perbaikan yang telah diberikan oleh responden. Saran perbaikan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di asrama seperti lemari dan lampu yang sering terputus, ruang tunggu untuk mentor saat pelaksanaan seminar, serta jaringan internet untuk di asrama.
2. Meningkatkan frekuensi pemeliharaan asrama terutama di bagian bak air di kamar mandi.
3. Meningkatkan penyebaran informasi pelayanan pelatihan di seluruh media informasi yang dimiliki.
4. Perlu adanya *ice breaking* selama penyampaian materi berlangsung panjang agar meningkatkan semangat peserta kembali.

E. Hasil Analisis

Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sudah menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara sepenuhnya. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada Periode Triwulan III dengan sampel data Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahap II Angkatan 155 dan 156 Tahun 2022 menghasilkan jumlah responden sebanyak 80 orang dari 80 orang peserta yang mengikuti pelatihan tersebut.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah penanganan pengaduan. Sedangkan unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan. Adapun urutan nilai per unsur pelayanan dari tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
Periode Triwulan II dan Periode Triwulan III

No	Unsur Pelayanan	TW II	Mutu	TW III	Mutu
1	Persyaratan	84,875	B	83,125	B
2	Prosedur	86,850	B	85,000	B
3	Waktu pelayanan	83,550	B	86,250	B
4	Biaya/tarif	89,475	A	87,825	B
5	Produk layanan	86,175	B	86,875	B
6	Kompetensi pelaksana	90,800	A	91,575	A
7	Perilaku pelaksana	88,825	A	88,750	A
8	Sarana dan Prasarana	87,500	B	89,700	A
9	Penanganan pengaduan	100,000	A	99,075	A
Hasil SKM/Nilai IKM		88,58	A	88,59	A

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara umum kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dipersepsikan Sangat Baik oleh peserta pelatihan/diklat aparatur. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berkisar di antara 88,31-100,00, adapun nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 88,592.
2. Semua unsur menunjukkan hasil setidaknya dalam kategori baik dengan nilai rata-rata Indeks 3,544. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat sangat memuaskan.

B. Saran / Rekomendasi

Dari hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat, saran dalam penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Perlu komitmen dari segenap sumber daya manusia yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pelatihan/diklat aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Perlu adanya penyebarluasan informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat di tahun berjalan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna memenuhi kewajiban untuk memperoleh 20 jam pelatihan setiap tahunnya.

31	3	4	3	3	3	4	4	4	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4
33	3	4	4	3	3	4	4	4	4
34	3	3	4	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	3	3	3	3	2	4
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4
37	3	3	3	4	3	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	3	3	4	3	4	4	3	4
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	4	4	3	4	4	4	4	4
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4
44	3	4	4	4	3	4	4	3	4
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4
46	3	3	4	2	3	4	4	3	4
47	3	3	3	4	3	4	3	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	3	4	4	4	4	4
50	3	3	3	3	3	4	3	4	4
51	3	3	4	4	4	4	3	4	4
52	3	3	4	3	4	4	4	4	4
53	3	3	3	3	3	3	3	3	4
54	3	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	3	3	3	3	4
56	3	4	4	3	3	4	3	4	4
57	3	3	4	4	3	4	4	4	4
58	4	4	3	3	3	3	3	4	4
59	3	3	3	3	3	3	3	3	4
60	3	3	4	4	4	4	4	4	4
61	4	3	3	4	4	3	3	4	4
62	3	4	3	3	3	4	4	3	4
63	3	4	3	4	3	3	3	3	4
64	3	3	3	3	4	4	4	3	4
65	3	3	4	4	4	4	4	4	4
66	3	3	3	4	3	3	3	3	4
67	4	3	3	3	3	3	3	3	3
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	3	3	3	4	4	4	4	4
70	3	3	3	4	4	3	4	3	4
71	3	3	3	3	3	3	3	2	4
72	3	4	3	4	3	3	3	3	4
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	3	3	3	3	3	3	3	4	4
75	3	3	4	3	3	3	3	3	3

76	3	3	3	3	3	4	3	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	4	3	4	3	3	3	4	4
79	3	3	3	4	3	3	3	4	3
80	3	3	4	4	3	4	4	3	4
Nilai /Unsur	266,00	272,00	276,00	281,00	278,00	293,00	284,00	287,00	317,00
NRR / Unsur	3,325	3,400	3,450	3,513	3,475	3,663	3,550	3,588	3,963
NRR tertbg/ unsur	0,369	0,377	0,383	0,390	0,386	0,407	0,394	0,398	0,440
								*)	**)
IKM Unit pelayanan								3,544	88,59

IKM UNIT PELATIHAN :	88,59
MUTU PELAYANAN :	SANGAT BAIK



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**

Periode Survei : September 2022

HASIL SKM / NILAI IKM :

88,59

MUTU PELAYANAN :

A

**KINERJA UNIT PELAYANAN :
SANGAT BAIK**

**JENIS / NAMA LAYANAN :
PENYELENGGARAAN PELATIHAN/DIKLAT APARATUR
RESPONDEN**

JUMLAH : 80 ORANG

JENIS KELAMIN : L = 31 ORANG ; P = 49 ORANG

USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
≤ 20 th : -	SD / MI : -	PNS : 80 orang
21 – 30 th : 63 orang	SMP / MTs : -	TNI / POLRI : -
31 – 40 th : 17 orang	SMA/K/ MA :	BUMN / BUMD : -
41 – 50 th : -	D-1 s.d D-4 :	Peg. Swasta : -
51 – 60 th : -	S-1 : 80 orang	Wirausaha : -
≥ 61 th : -	S-2 / Profesi : -	Tani/RT/pelajar/mhs : -
	S-3 :	Lainnya/peg. Inst. P : -

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN;
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
PELAYANAN PUBLIK KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**